

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Akerman, Bruce, 2000, *The New Separation of Powers*, The Harvard Law Review, Vol. 113, HLVR 633.
- Algra, N. E., dkk, Penerjemah: Saleh Adiwinata, dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Alrasid, Harun, 1999, *Pengisian Jabatan Presiden*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Arifin, Firmansyah, *et. al*, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cet. 1, KRHN. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Bekasi.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhary, Muhammad Taher, 1987, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Gramedia, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2008, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta.
- Efriza, 2014, *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, Dan Lanskap Politik Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Fadjar, A. Mukthie, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI*, Jakarta.
- Falaakh, Mohammad Fajrul, 2014, *Konsisten Mengawal Konstitusi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Friedmann, W., 1960, *Legal Theory*, Steven & Son Limited, London.
- Hakim, Lukman, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia, Eksistensi Komisi-Komisi (State Auxiliary Agency). Sebagai Organ Negara Yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Harman, Benny K. dan Hendaridi, 1991, *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, Yayasan LBH Indonesia & Jarim, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo.
- HS, H. Salim, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2007, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- Indrayana, Denny, 2016, *Jangan Bunuh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Intrans Publishing, Indonesia Corruption Watch (ICW), Pukat Korupsi Fakultas Hukum UGM, Malang, Jawa Timur.
- \_\_\_\_\_, 2007, *UUD 1945; Antara Mitos & Pembongkaran* Diterjemahkan dari *Indonesian Constitutional Reform 1992-2002; An*

*Evaluation of Constitution-Making in Transition*, PT Mizan Pustaka, Bandung.

Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Garner, Brian N, 2009, *Black Law Dictionary (Ninth Edition)*, West Group.

Grosso, Carlo Federico, 1996, *Independence of The Judiciary and Judicial Repression of the Phenomenon of Corruption, Dalam Responding to Corruption; Social Defence, Corruption, and The Protection of the Public Administration, and The Independence of Justice, Updated Documents of The XIII International Congress On Social Defence Lecce, Italy*. Di edit oleh Paolo Bernasconi, 2000.

Kusnardi, Moh., dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Lijphart, Arendt, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lindsey, Timothy, 1999, *From Rule of Law to Law of the Rulers to Reformation?* Dalam Timothy Lindsey (ed) *Indonesia: Law and Society*.

Lubis, M. Solly, 2014, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, CV. Mandar Maju.

Mahmuzar, 2010, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung.

Marshall, Geoffrey, 1971, *Constitutional Theory*, Oxford University Press, London.

MD., Mahfud, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaran Indonesia, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cet ke-4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Manan, Bagir, 2001, *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH-UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Jakarta.
- Milkovich, Michael E. dan George J. Gordon, 2001, *Public Administration in America*, Wadsworth and Thomson Learning.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2014, *Lembaga Negara Independen Pasca Amandemen UUD 1945*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Muladi, 2006, *Konsep Total Enforcement Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Politik Hukum*, (Makalah Disampaikan Pada Forum Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Intensifikasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta 8 November 2006.
- Musakkir, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan, Problem Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Juli 2014.
- Nurtjahjo, Hendra, 2004, *Politik Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus UI – Depok.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Schmid, J. J Von, 1988, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Edisi Terjemahan oleh R. Riwayatno, et all*, Cetakan Keenam, PT Pembangunan. Jakarta.
- Stepan, Alfred, and Cindy Skach, 1993, *Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation; Parliamentarianism and Presidentialism*, dalam *Journal of World Politics*, Vol. 46. No. 1.
- SF. Marbun dan Mahfud MD, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang.
- Sunny, Ismail, 1987, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Cet VI. Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Strong, C.F., 2015, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Cet Kesepuluh, Nusa Media, Bandung.

Sumardjono, Maria SW., 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tauda, Gunawan A., 2012, *Komisi Negara Independen Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Genta Press, Yogyakarta.

Thaib, Dahlan, 2004, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Tambunan, A.S.S., 2002, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Puporis, Jakarta.

Wahyono, Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill co, Jakarta.

### **Risalah-Risalah**

Risalah Sidang Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, 40/PUU-XV/2017, dan 47/PUU-XV/2017, perihal pengujian undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Risalah Sidang Pembahasan Draft RUU MD3 oleh Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI 7 Februari 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggara negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, Setelah Perubahan UUD Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3282.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620.

### **Putusan-Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 26 Maret 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU/VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 31 Januari 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 8 Februari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 perihal pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 8 Februari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 28 Juni 2018.

### **Karya Ilmiah Disertasi, Tesis, Skripsi, dan Jurnal.**

Attamimi, A. Hamid S., 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta.

- Mochtar, Zainal Arifin, 2012, *Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan UUD 1945*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Kristiana, Yudi, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi, Yogyakarta.
- Harlina, Indah, 2008, *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana UI, Jakarta.
- Sidharta, B. Arief, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), *Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3 Tahun II, November 2004.
- Fitria, 2014, *Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket*. Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 1 Juni 2014.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011, *Pengkajian Konstitusi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Putra WP, Dhangku, 2011, *Penggunaan Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Bank Century)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Acvionita, Rindi, 2014, *Karakteristik dan Fungsi Serta Sistem Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Eka Juliansyah, Rangga, 2016, *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Dasar Pemberhentian Kepala Daerah*, Tesis, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Cumbhadrika, Chitto, 2011, *Dinamika Penggunaan Hak Angket DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Tantowi, Andi, 2013, *Mekanisme Penggunaan Hak Angket di Indonesia*, Skripsi, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Silvi Dhesinta Rini, Wafia, 2017, *Pro Kontra Hak Angket KPK*, Laboratorium Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Naswar, Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. I, Nomor. 1, November 2012.

### Website

Dariyanto, Erwin, “110 Pakar Hukum Tata Negara: Hak Angket Modus Serang KPK” <https://news.detik.com/berita/d-3530149/110-pakar-hukum-tata-negara-hak-angket-dpr-modus-serang-kpk>, diakses 4 September 2017.

Tashandra, Nabilla, “Pendapat Yusril Bikin Pansus Tak Lagi Ragu Ajukan Angket KPK” <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/10591821/pendapat.yusril.bikin.pansus.tak.lagi.ragu.ajukan.angket.kpk>, diakses 4 September 2017.

Hakim, Rakhmat Nur, “Beberapa Pasal di UU MD3 yang membuat DPR Kian Tak Tersentuh” <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/13/09145281/beberapa-pasal-di-uu-md3-yang-membuat-dpr-kian-tak-tersentuh>, diakses 12 Maret 2018.

Ahmad Faiz, “DPR Tersinggung oleh Surat KPK Soal Pemanggilan Miryam S Haryani” <https://nasional.tempo.co/read/886018/dpr-tersinggung-oleh-surat-kpk-soal-pemanggilan-miryam-s-haryani/full&view=ok>, diakses 25 Februari 2018

Toyudho, Eko Siswono, “KPK Tetapkan Setya Novanto sebagai tersangka Korupsi E-KTP” <https://video.tempo.co/read/7230/kpk-tetapkan-setya-novanto-sebagai-tersangka-korupsi-e-ktp>, diakses 25 Februari 2018.

Irawan, Dhani, “Prof Indriyanto: Hak Angket DPR ke KPK itu *Obstruction of Justice*”, <https://news.detik.com/berita/3487455/prof-indriyanto-hak-angket-dpr-ke-kpk-itu-obstruction-of-justice>, diakses 5 Juli 2018.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses 15 Desember 2017.

### Wawancara dan Dokumen Hak Angket KPK

Agun Gunanjar, DPR RI, wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juli 2018.

Laporan Panitia Angket DPR RI, Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Februari 2018 Jakarta.